BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan instansi yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala kegiatan operasional yang terjadi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan pemerintah maka diperlukan penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memiliki kriteria relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dipengaruhi oleh factor-faktor seperti Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi.

Laporan keuangan yang dibuat harus mengikuti prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang telah ditentukan melalui aturan. Secara umum SAP berbentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang memiliki judul, nomor, dan tanggal efektif berlaku standar tersebut. Selain itu SAP juga memiliki Kerangka

Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang menjadi rangka penyusunan. Dengan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintah yang baik maka Kualitas Laporan Keuangan yang disajikan akan memiliki kualitas informasi yang baik. Kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, umumnya digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan.

Pada peneliti sebelumnya yang meneliti tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu Ikyarti dan Aprila (2019), Elfauzi (2019), Armel (2017), Latifah (2015), Nugroho (2018), Rama (2019), Cahyandari (2017), Rahmawati (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh Ramadhan (2018), Mildamayanti (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut (research gap) maka peneliti ingin mengkaji ulang apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah mempengaruhi kualitas laporan keuangan, dengan daerah penelitian yang berbeda serta tahun penelitian yang berbeda.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu system usaha yang diterapkan oleh perusahaan yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan perusahaan agar melakukan kegiatan sesuai dengan

tujuan dan program perusahaan sehingga efisiensi dan kebijakan manajemen terpenuhi.

Salah satu cara untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal suatu instansi dikatakan baik adalah dapat dilihat dari Opini Auditor. Berdasarkan laporan yang telah diterbitkan BPK RI mengenai hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah kota Denpasar tahun 2014 yang memuat opini “Wajar Tanpa Pengecualian” Nomor 09.A/LFIP/XIX.DPS/05/2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 09.C/LHP/XIX.DPS/05/2015 tanggal 29 Mei 2015, menyatakan adanya kelemahan pada Sistem Pengendalian Internal berupa :

1. Sistem Pengendalian Intern atas Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar belum memadai.
2. Pengelolaan PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar belum memadai.
3. Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum tertib, dan
4. Pertanggungjawaban Belanja Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tidak didukung dengan verifikasi yang memadai.

Berdasarkan pemberian opini BPK diatas dapat dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal pada Kota Denpasar belum memadai.

Pada peneliti sebelumnya yang meneliti tentang Sistem Pengendalian Internal yaitu Ikyarti, Aprila (2019), Armel (2017), Ramadhan (2018), Mildamayanti (2018), Rahmawati (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa

Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh Latifah (2015), Nugroho (2018), Rama (2019), Cahyandari (2017) menghasilkan kesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut (research gap) maka peneliti ingin mengkaji ulang apakah Sistem Pengendalian Internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan, dengan daerah penelitian yang berbeda serta tahun penelitian yang berbeda.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Teknologi Informasi. Secara umum Pemanfaatan Teknologi Informasi ialah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer terutama pada aplikasi *hardware* (perangkat keras) dan *software* (perangkat lunak komputer). Secara sederhana, pengertian teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, teknologi informasi juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Menurut Yosefrinaldi (2013) menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi juga mempunyai andil yang besar untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas.

Pada peneliti sebelumnya yang meneliti tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi yaitu Armel (2017), Rama (2019), Cahyandari

(2017), Mildamayanti (2018), Rahmawati (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh Nugroho (2018), menghasilkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut (research gap) maka peneliti ingin mengkaji ulang apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan, dengan daerah penelitian yang berbeda serta tahun penelitian yang berbeda.

Selain Pemanfaatan teknologi, Komitmen Organisasi juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Ramadan (2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang reliable sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Komitmen organisasi mengandung pengertian sebagai suatu sikap atau tingkah laku seseorang kepada organisasi berupa loyalitas dan tercapainya visi, misi serta tujuan organisasi. Seseorang bisa disebut mempunyai komitmen yang tinggi kepada organisasi, bisa diketahui dengan melihat ciri-ciri diantaranya kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi, dengan kata lain komitmen organisasi menyiratkan hubungan antara karyawan dengan perusahaan secara aktif karena karyawan yang menunjukkan komitmen tinggi pasti akan memberikan tenaga dan

tanggungjawab yang lebih dalam mencapai keberhasilan dari organisasi atau tempatnya bekerja. Dengan komitmen yang tinggi akan menimbulkan rasa memiliki, sehingga ada keterkaitan antara anggota dengan organisasinya (Widari dan Sutrisno, 2017).

Pada peneliti sebelumnya yang meneliti tentang Komitmen Organisasi yaitu Nugroho (2018) menghasilkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan adanya hasil penelitian tersebut maka peneliti ingin mengkaji ulang apakah Komitmen Organisasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan, dengan daerah penelitian yang berbeda serta tahun penelitian yang berbeda.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Agency Theory* sebagai teori yang digunakan untuk menjelaskan tanggungjawab pemerintah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap principal.

Mengacu pada teori agensi (*agency theory*), akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto dkk, 2007 dalam Faristina, 2011).

Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori kepatuhan sebagai teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel-variabel serta mengukur tingkat kepatuhan para pegawai instansi

pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah, menjalankan sistem pengendalian internal, memanfaatkan teknologi informasi, dan mengukur tingkat kepatuhan para pegawai dalam mewujudkan visi dan misi pada instansi terkait.

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-limu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.

Berdasarkan uraian sebelumnya dan terdapat hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bermaksud untuk meneliti **Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD kota denpasar ?
2. Apakah system pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD kota denpasar ?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD kota denpasar ?

4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD kota Denpasar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan pokok permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui apakah system pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD kota Denpasar.
3. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD kota Denpasar.
4. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD kota Denpasar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoristis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan serta memberikan informasi atau pemahaman

lebih mendalam mengenai kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penyusunan laporan keuangan dengan kualitas yang baik berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan judul yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*prinsipal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal (Jensen & Meckling, 1976). Mengacu pada teori agensi (*agency theory*), akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto dkk, 2007 dalam Faristina, 2011).

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan

para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*). Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya (Faristina, 2011).

2.1.2 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Septiani(2005) dalam Faristina (2011), terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan dalam *tangible*, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Berdasarkan perspektif normatif maka sudah seharusnya bahwa teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi. Apalagi kepatuhan entitas pelaporan dalam menyampaikan laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam memenuhi kepatuhan terhadap pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Faristina, 2011).

2.1.3 Laporan Keuangan

1) Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.

2) Jenis Laporan Keuangan :

Jenis Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ada 5 yaitu sebagai berikut :

- a) Laba Rugi merupakan laporan keuangan yang memberikan rincian pendapatan yang didapat dan beban yang terjadi selama satu periode akuntansi pada suatu perusahaan atau mengetahui perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada periode tersebut.
- b) Laporan Perubahan Modal merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai perubahan modal pada suatu perusahaan yang terjadi selama satu periode akuntansi, fungsinya yaitu untuk mengetahui modal perusahaan bertambah atau berkurang.

- c) Neraca merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang di dalamnya terdapat informasi mengenai aktiva, kewajiban, juga ekuitas pemegang saham pada akhir periode akuntansi perusahaan tersebut.
- d) Laporan Arus Kas merupakan laporan keuangan yang difungsikan untuk mengetahui arus kas masuk dan kas keluar, dan juga untuk melihat pengaruhnya terhadap saldo kas akhir periode. Arus kas masuk contohnya seperti pendapatan atau pinjaman dari pihak lain sedangkan arus kas keluar contohnya seperti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan perusahaan.
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan lain yang diberikan. Laporan ini memberikan informasi atau penjelasan secara detail yang dianggap perlu terhadap laporan keuangan yang ada. Tujuannya yaitu agar pengguna laporan keuangan jelas dengan data yang diberikan.

3) Manfaat Laporan Keuangan

Adapun beberapa uraian terkait manfaat laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai bahan evaluasi bisnis

Dalam seluruh kegiatan yang kita lakukan pada dasarnya membutuhkan sebuah evaluasi demi kemajuan yang lebih baik.

Hal tersebut juga berlaku pada bisnis, yang mana dengan adanya laporan keuangan ini dapat menilai bisnis yang sedang dijalani,

mengetahui kekurangan yang ada, dan ketepatan dalam bertindak khususnya dalam penggunaan dana. Sehingga ketika anda memiliki laporan keuangan yang baik maka akan memberikan pengaruh terhadap kelangsungan bisnis kedepannya menjadi lebih baik. Dimana anda dapat lebih berhati-hati dalam bertindak dan melakukan manajemen keuangan dengan lebih baik lagi. Selain itu, dengan laporan keuangan dapat membantu anda dalam mengetahui perkembangan bisnis yang sedang dijalankan.

b) Sebagai bahan untuk berinovasi

Adanya laporan keuangan dapat memberikan peluang bagi anda dan dapat memberikan suatu ide tersendiri. Mengingat ketika laporan keuangan dibuat dengan baik dan lengkap, maka secara tidak langsung akan membuat anda mengetahui apa yang harus dilakukan. Sehingga dalam menjalankan bisnis anda dengan mudah untuk melakukan inovasi atau terobosan untuk membawa bisnis anda semakin sukses dan bertahan ditengah persaingan bisnis yang ketat.

c) Sebagai pertanggungjawaban

Pada dasarnya laporan keuangan dibuat untuk melakukan sebuah pertanggung jawaban atas seluruh transaksi keuangan yang dilakukan. Mengingat sebagai anda pelaku bisnis dalam membuat laporan keuangan ini sudah menjadi tanggung jawab. Dimana hal tersebut terkait dengan cara dan untuk apa dana tersebut.

d) Sebagai acuan pengambilan keputusan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa laporan keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengambil sebuah keputusan. Terutama bagi anda yang menjadi pemimpin suatu perusahaan, yang mana dengan adanya laporan tersebut maka anda harus dengan segera mengambil sebuah keputusan terkait dengan keuangan.

Selain beberapa manfaat laporan keuangan di atas, laporan keuangan juga memiliki manfaat untuk berbagai pihak seperti pihak investor, karyawan, pelanggan, pemberi pinjaman, pemerintah, dan lain sebagainya. Manfaat laporan keuangan untuk pihak investor ini akan memberikan suatu pandangan untuk bertindak kedepannya. Dimana dengan adanya laporan keuangan pihak investor dapat memikirkan tindakan apa yang akan dilakukan, apakah akan berinvestasi atau tidak. Selain itu dengan adanya laporan keuangan memungkinkan pihak investor untuk melakukan penilaian terhadap suatu perusahaan.

2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintah

1) Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam tindak penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. Laporan bisa berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Standar tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan sekaligus untuk memberikan peningkatan kualitas dari LKPP dan LKPD. Secara umum, SAP berbentuk Pernyataan yang memiliki judul, nomor, dan tanggal efektif berlaku standar tersebut. Selain itu, SAP memiliki Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang menjadi rangka penyusunan.

2) Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Prinsip-prinsip dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengemukakan delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi :

a) Basis Akuntansi

Pada prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), basis akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dalam bentuk basis laporan operasional, akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan agar basis akuntansi disajikan bersama laporan keuangan dengan basis kas.

b) Nilai Historis

Dapat berupa aset yang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara dengan kas yang dibayar. Aset yang dicatat juga bisa sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Nilai historis lebih

dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi dengan mudah.

c) Realisasi

Pendapatan basis kas tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu periode akuntansi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Biasanya digunakan untuk membayar utang dan melakukan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang wajib disusun, maka pendapatan basis kas harus diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah maupun mengurangi kas.

d) Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Prinsip ini sebagai Informasi yang dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Maka dari itu, segala bentuk harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya saja.

e) Periodisitas

Agar kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan, maka kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan harus dibagi menjadi beberapa periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, meskipun dikehendaki pula periode bulanan, triwulan, dan semester.

f) Konsistensi

Konsistensi bisa berupa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Keadaan tersebut bukan berarti tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, namun metode akuntansi yang dipakai dapat diganti dengan syarat. Adapun syarat tersebut adalah metode yang baru diterapkan harus mampu memberikan informasi yang lebih baik daripada metode lama.

g) Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap segala informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selain itu pengungkapan informasi harus dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h) Penyajian Wajar

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat sangat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan dan manajemen keuangan ketika menghadapi ketidakpastian pada peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian tersebut diakui dengan mengungkapkan hakikat dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat tersebut dapat mengandung unsur kehati-hatian sehingga dalam laporan keuangan aset tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

3) Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan berjalan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat untuk dipertanggung jawabkan. Standar akuntansi diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Apabila tidak ada standar akuntansi yang memadai dapat menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam proses pemeriksaan (Mardiasmo, 2004).

4) Jenis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Menurut Rahayu (2014) Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mempunyai pilihan dua basis yaitu :

a) SAP berbasis akrual

Penerapan SAP berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Melalui SAP berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik ekonomi,

sosial, maupun politik. . Suatu pemerintahan yang menerapkan SAP akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam lingkungan pemerintahan.

b) **SAP berbasis kas menuju akrual**

SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

2.1.5 Sistem Pengendalian Internal (SPI)

1) Pengertian Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Menurut Purwono (2004) Pengendalian internal pemerintah merupakan segenap rencana, metode serta kebijakan yang terkoordinasi dalam suatu entitas bertujuan mengamankan harta yang dimiliki serta menguji ketepatan dan keakuratan data akuntansi.

2) Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Mardi (2014) sesuai dengan definisi AICPA pengendalian internal mempunyai beberapa tujuan yaitu :

- a) Menjaga harta kekayaan milik instansi.
- b) Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi.
- c) Meningkatkan efisiensi operasional.
- d) Membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan.

3) Manfaat Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal digunakan untuk pengendalian dalam akuntansi keuangan, dan memberikan jaminan terlaksananya

strategi yang direncanakan pada instansi secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan laporan keuangan yang baik. Adanya sistem pengendalian intern yang optimal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas guna meminimalkan resiko dan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Harnoni, 2016).

Sistem pengendalian internal yang baik dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas-batas yang di anggap layak, dan apabila terjadi kesalahan akan segera diketahui dan diatasi secara cepat. Sistem pengendalian internal yang baik harus didukung oleh sistem dan prosedur yang memadai, tenaga pelaksana yang memiliki integritas dan memenuhi kualifikasi profesi, dan adanya pemisahan tugas yang jelas setiap bidang kegiatan. Melakukan evaluasi terhadap rancangan dan menguji ketaatan dalam pelaksanaan struktur pengendalian internal adalah cara untuk mengetahui seberapa jauh pengendalian tersebut dilaksanakan (Purwono, 2004).

4) Unsur- unsur Sistem Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah terdiri atas unsur :

- a) Lingkungan pengendalian.
- b) Penilaian resiko.
- c) Kegiatan pengendalian.
- d) Informasi dan komunikasi.
- e) Pemantauan pengendalian internal.

2.1.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi

1) Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses mendapatkan menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Dalam penjelasan peraturan pemerintah No.56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan bahwa menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

2) Tujuan Teknologi Informasi

Tujuan Teknologi Informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan

efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkan pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien.

3) Fungsi Teknologi Informasi

Teknologi informasi juga memiliki fungsi yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan kerja dan bermasyarakat. Fungsi teknologi informasi di antaranya sebagai berikut.

a) Fungsi Penangkap (Capture)

Teknologi informasi berfungsi sebagai penangkap, wadah, dan pengolah rincian secara detail dari berbagai sumber yang tersedia. Sebagai contoh menerima data yang masuk dari sebuah keyboard, scanner, mic, dan lainnya.

b) Fungsi Pengolah (Processing)

Yang kedua berfungsi sebagai tempat pengolahan dan proses dari sebuah data yang diterima untuk menjadi sebuah informasi. Pengolahan tersebut dapat berupa perubahan data dari satu bentuk ke bentuk lain, analisis, serta perhitungan.

c) Fungsi Menghasilkan (Generating)

Fungsi dari teknologi informasi ini sebagai tempat menghasilkan atau pengorganisir sebuah informasi ke dalam bentuk lain yang

mempunyai karakteristik berbeda sesuai kebutuhan. Sebagai contoh sebuah laporan dalam bentuk tulisan, tabel, atau bagan.

d) Fungsi Penyimpan (Storage)

Fungsi teknologi informasi yang tidak kalah penting adalah sebagai sarana penyimpanan. Bukan hanya itu, teknologi informasi juga dapat difungsikan sebagai teknologi perekam data dan informasi dalam suatu media. Misalnya sebuah flashdisk, harddisk, tape recorder, dan sebagainya.

e) Fungsi Pencari Kembali (Retrifal)

Fungsi teknologi informasi ini untuk mencari serta mendapatkan kembali sebuah informasi atau menyalin data informasi yang sudah tersimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Misalnya mencari konsumen yang sudah melakukan pelunasan.

f) Fungsi Transmisi (Transmission)

Fungsi transmisi teknologi informasi ini maksudnya adalah sebagai media pendistribusian data dan informasi dari satu tempat ke tempat lain dengan memanfaatkan jaringan komputer. Misalnya mengirimkan data permintaan barang dari konsumen.

4) Peranan Teknologi Informasi

Sudah sepantasnya sebuah teknologi memegang peranan penting dalam kehidupan. Sebagai contoh peranan teknologi informasi yang memang sangat dibutuhkan, terutama dalam bidang bisnis. Di bawah ini merupakan peran penting dari teknologi informasi, yaitu sebagai berikut :

a) Memudahkan Komunikasi

Salah satu peranan yang cukup penting dalam dunia bisnis ada pada komunikasi. Dengan adanya teknologi informasi, komunikasi dalam dunia bisnis menjadi lebih mudah dan cepat. Sehingga kegiatan bisnis bisa cepat terselesaikan dan semakin berkembang. Sebagai contoh peranan ini ada pada email. Surat elektronik atau email merupakan teknologi informasi yang sudah wajib sebagai salah satu alat komunikasi. Dalam dunia bisnis, surat elektronik ini dipakai untuk komunikasi antar karyawan, atasan dan pelanggan. Sesuai fungsinya, penggunaan dari email yang mudah menjadikan komunikasi dalam bisnis lebih efisien dan efektif. Semakin berkembangnya teknologi, kemudian munculah teknologi informasi lain yang bisa membuat lebih mudah, sebagai contoh chatting di aplikasi whatsapp, Line, atau sebagainya.

b) Manajemen Database

Sesuai dengan fungsi dari teknologi informasi yang sudah diulas di atas, salah satu peranan yang cukup penting adalah sebagai sarana untuk pengarsipan dokumen. Melalui teknologi informasi, sebuah perusahaan dapat memiliki database segala hal, terutama dalam dunia bisnis. Hal tersebut juga akan memberikan dampak lain yakni tidak dibutuhkannya lagi lemari-lemari besar tempat menyimpan arsip-arsip. Cukup dengan penyimpanan digital

seperi hardisk dengan kapasitas besar semua bisa tesimpan dengan aman.

c) Manajemen Sistem Informasi

Peranan lain dari teknologi informasi dalam dunia bisnis terutama perusahaan adalah manajemen sistem informasi. Dengan adanya teknologi semacam ini, perusahaan dapat melacak data penjualan, biaya dan tingkat produktivitas secara mudah.

d) Customer Relationship Management (CRM)

Peran dari teknologi informasi selanjutnya adalah sebagai manajemen hubungan customer, atau yang sering disebut CRM. Dalam perencanaan dan pengelolaan hubungan dengan pelanggan, akan dimudahkan melalui teknologi satu ini. Dengan adanya CRM dapat menyimpan setiap data riwayat hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, sehingga jika memerlukan data pelanggan mendadak, maka sudah terekam dengan baik pada sistem tersebut. Peningkatan kepuasan pelanggan juga bisa berdampak karena adanya pelayanan yang cepat dari perusahaan.

e) Dapat Berjalan 24 jam Penuh

Peranan teknologi informasi yang dapat diandalkan adalah mampu menjalankan bisnis selama 24 jam full dalam sehari. Dengan adanya teknologi informasi maka bisnis yang Anda jalankan tidak terbatas ruang dan waktu. Semua bisa diawasi melalui teknologi yang dibuat sedemikian rupa. Hal tersebut

berkaitan dengan persaingan bisnis di bidang pelayanan yang Anda berikan semakin mudah dikenal masyarakat dan akan berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi.

2.1.7 Komitmen Organisasi

1) Pengertian Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah sikap atau bentuk perilaku seseorang terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas dan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Menurut Greenberg & Baron (2003:160) Komitmen organisasi adalah derajat dimana karyawan terlibat dalam organisasinya dan berkeinginan untuk tetap menjadi anggotanya, dimana didalamnya mengandung sikap kesetiaan dan kesediaan karyawan untuk bekerja secara maksimal bagi organisasi tempat karyawan tersebut bekerja.

Seseorang dikatakan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi, dapat dikenali dengan ciri-ciri antara lain kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi.

2) Aspek-Aspek Komitmen Organisasi

Berikut ini terdapat beberapa aspek-aspek komitmen organisasi, terdiri atas :

a) Identifikasi

Identifikasi yang berwujud dalam bentuk kepercayaan anggota terhadap organisasi. Guna menumbuhkan identifikasi dilakukan

dengan memodifikasi tujuan organisasi/organisasi, sehingga mencakup beberapa tujuan pribadi para anggota atau dengan kata lain organisasi memasukan pula kebutuhan dan keinginan anggotan dalam tujuan organisasi atau organisasi. Hal ini akan menumbuhkan suasana saling mendukung di antara para anggota dengan organisasi. Lebih lanjut membuat anggota dengan rela menyumbangkan tenaga, waktu, dan pikiran bagi tercapainya tujuan organisasi.

b) Keterlibatan

Keterlibatan atau partisipasi anggota dalam aktivitas-aktivitas kerja penting untuk diperhatikan karena adanya keterlibatan anggota menyebabkan mereka bekerja sama, baik dengan pimpinan atau rekan kerja. Cara yang dapat dipakai untuk memancing keterlibatan anggota adalah dengan memasukan mereka dalam berbagai kesempatan pembuatan keputusan yang dapat menumbuhkan keyakinan pada anggota bahwa apa yang telah diputuskan adalah keputusan bersama.

c) Loyalitas

Loyalitas anggota terhadap organisasi memiliki makna ksesediaan seseorang untuk bisa melanggengkan hubungannya dengan organisasi kalau perlu dengan mengorbankan kepentingan pribadinya tanpa mengharapkan apa pun.Keinginan anggota untuk mempertahankan diri bekerja dalam organisasi adalah hal yang dapat menunjang komitmen anggota terhadap

organisasi di mana mereka bekerja. Hal ini di upayakan bila anggota merasakan adanya keamanan dan kepuasan dalam tempat kerjanya.

3) Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi “Allen dan Meyer(1990)” yaitu:

a) Karakteristik Pribadi Individu

Karakteristik pribadi terbagi kedalam dua variable yaitu variable demografis dan variable disposisional. Variable demografis mencakup gender, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan dan lamanya seseorang bekerja pada suatu organisasi. Sedangkan variable disposisional mencakup, kepribadian dan nilai yang dimiliki anggota organisasi. Variabel disposisional ini memiliki hubungan yang lebih kuat dengan komitmen berorganisasi, karena adanya perbedaan pengalaman masing-masing anggota dalam organisasi tersebut.

b) Karakteristik Organisasi

Yang termasuk dalam karakteristik organisasi itu sendiri yaitu: struktur organisasi, desain kebijaksanaan dalam organisasi dan bagaimana kebijaksanaan organisasi tersebut disosialisasikan.

c) Pengalaman Organisasi

Sedangkan pengalaman berorganisasi tercakup ke dalam kepuasan dan motivasi anggota organisasi selama berada dalam

organisasi, perannya dalam organisasi tersebut dan hubungan antara anggota organisasi dengan supervisor pimpinannya.

4) Manfaat Komitmen dalam Organisasi

Manfaat dengan adanya Komitmen dalam organisasi adalah sebagai berikut :

- a) Para pekerja yang benar-benar menunjukkan komitmen tinggi terhadap organisasi mempunyai kemungkinan yang jauh lebih besar untuk menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam organisasi.
- b) Memiliki keinginan yang lebih kuat untuk tetap bekerja pada organisasi yang sekarang dan dapat terus memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan.
- c) Sepenuhnya melibatkan diri pada pekerjaan mereka, karena pekerjaan tersebut adalah mekanisme kunci dan saluran individu untuk memberikan sumbangannya bagi pencapaian tujuan organisasi.
- d) Keyakinan tentang pentingnya komitmen dalam kaitannya dengan efektivitas organisasi.

2.1.8 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

1) Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja dari program dan kegiatan; realisasi dari pencapaian target pendapatan, penyerapan belanja, dan pembiayaan (Bastian, 2010).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Informasi laporan keuangan dikatakan berkualitas dan bermanfaat apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sebagaimana disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain :

a) Relevan

Apabila informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau sekarang serta memprediksi masa depan dan mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki karakteristik :

- Manfaat umpan balik (*feedback value*)
- Manfaat prediktif (*redictive value*)
- Tepat waktu (*timeliness*)
- Lengkap

b) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta

secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memiliki karakteristik berikut :

- Penyajian jujur
- Dapat diverifikasi
- Netralitas

c) Dapat dibandingkan

Informasi pada laporan keuangan lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya.

d) Dapat dipahami

Informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan oleh pengguna.

2) Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Halim (2002) secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah memberikan informasi keuangan terhadap :

a) Akuntabilitas

Yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan kepada unit organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.

b) Manajerial

Yaitu menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan keuangan pemerintah dan

memudahkan pengendalian yang efektif atas aset, hutang dan ekuitas dana.

c) **Transparasi**

Yaitu menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

3) Komponen laporan keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c) Laporan Operasional
- d) Laporan Perubahan Ekuitas
- e) Neraca
- f) Laporan Arus Kas
- g) Catatan atas Laporan Keuangan.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian ini, penulis mengutip ringkasan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai dasar perbandingan. Perbandingan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan plagiatisme, dan menunjukkan perbedaan secara spesifik dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian

yang sudah ada sebelumnya. Adapun ringkasan dari hasil penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Ikriyati dan Aprila(2019) melakukan penelitian menggunakan variabel Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu menggunakan statistik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Seluma.

Elfauzi (2019) melakukan penelitian menggunakan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Peran Internal Audit dan Kualitas Laporan Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (multivariate analysis). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap laporan keuangan, sedangkan Penerapan SAP berpengaruh positif terhadap laporan keuangan serta Peran Internal Audit berpengaruh negatif terhadap laporan keuangan.

Armel (2017) melakukan penelitian menggunakan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan. Metode analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kompetensi SDM, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah,

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Dumai.

Latifah (2015) melakukan penelitian menggunakan variabel Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah, sedangkan Sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah Kabupaten Bandul.

Ramadhan (2018) melakukan penelitian menggunakan variabel Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kompetensi Staf Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surakarta, sedangkan sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surakarta.

Nugroho (2017) melakukan penelitian menggunakan variabel Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem

Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi dan Kualitas Laporan Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data (Uji Validasi dan Uji Reabilitas), Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas), Analisis Regresi Berganda, Uji Hipotesis (Uji F, Uji Koefisien Determinasi, dan Uji t). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penerapan SAP, Kompetensi SDM dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan Penerapan SPI dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali.

Rama (2019) melakukan penelitian menggunakan variabel Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

Cahyandari (2017) melakukan penelitian menggunakan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas

Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan penerapan system pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Mildamayanti (2018) melakukan penelitian menggunakan variabel Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah, sedangkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Rahmawati (2018) melakukan penelitian menggunakan variabel Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi dan system pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas adapun persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yang akan saya lakukan adalah terdapat kesamaan pada variabel independennya yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaat

Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi, begitu juga dengan variabel Dependennya yaitu Kualitas Laporan Keuangan serta sama-sama meneliti di instansi pemerintah daerah. Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah perbedaan tempat penelitiannya, pada penelitian saat ini dilakukan pada Pemerintahan Kota Denpasar Provinsi Bali serta terdapat perbedaan tahun penelitiannya.

Penelitian ini memodifikasi variabel dari penelitian-penelitian sebelumnya yang diharapkan berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, seperti Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi. Pemilihan Variabel Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dilatarbelakangi oleh pernyataan BPK RI mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintahan Kota Denpasar.